

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan dua institusi penegak hukum yang secara khusus memiliki kewenangan menangani tindak pidana korupsi. Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah pelaksana fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) menyebutkan bahwa KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Konflik antara KPK dan Polri dapat dikatakan bermula dari pencalonan Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai calon Kapolri yang kemudian ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka pada tanggal 13 Januari 2015. KPK menetapkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus “Rekening Gendut” dan gratifikasi.

Tidak lama kemudian, pada tanggal 23 Januari 2015, Badan Reserse Kriminal Mabes Polri menangkap Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto

dengan tuding menjadi orang dibalik pemberian kesaksian palsu dalam sengketa pilkada Kotawaringin, Kalimantan Tengah pada tahun 2010. Selanjutnya, pada tanggal 24 Januari 2015, pimpinan KPK yakni Adnan Pandu Praja (Wakil Ketua KPK) diadukan ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri atas dugaan pemalsuan surat notaris dan penghilangan saham PT Desy Timber. Kemudian pada tanggal 25 Januari 2015, Presiden Joko Widodo membentuk Tim Independen untuk menangani kericuhan KPK dan Polri kemudian memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk menentukan suatu sikap. Tim Independen yang beranggotakan salah satunya yakni Oegrosono (Mantan Wakapolri), Jimly Assidiqie, Ahmad Syafii Maarif (Mantan Ketua Umum Muhammadiyah), Hikmahanto Juwana (Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia), dan Erry Riyana Harjapamekas (mantan Wakil Ketua KPK).

Pada tanggal 26 Januari 2015, kembali lagi pimpinan KPK, Zulkarnaen (Wakil Ketua KPK) diadukan ke kepolisian terkait dengan penghentian penyidikan kasus korupsi dana hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Jawa Timur pada 2008 yang diduga melibatkan Gubernur Jawa Timur.

Hal serupa juga menimpai Ketua KPK, Abraham Samad yang dianggap telah melanggar kode etik KPK karena melakukan pertemuan dengan fungsionaris PDIP terkait pencalonan cawapres dari Joko Widodo saat jelang pemilihan presiden 2014. Namun patut disayangkan hal ini seperti terdapat nuansa politis didalamnya.

Disisi lain masyarakat menuntut ketegasan Presiden Joko Widodo dalam menyelesaikan kisruh antara KPK dan Polri untuk dapat diselesaikan secepatnya. Pada tanggal 16 Februari 2015, pengajuan pra peradilan Komjen Pol Budi Gunawan diterima sebagian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan pada saat hari yang sama Abraham Samad juga ditetapkan tersangka oleh Pengadilan Negeri Makassar.

Upaya penangkapan para pimpinan KPK diatas menimbulkan efek cukup besar serta dibumbui dengan berbagai dugaan, begitu gencar diberitakan media massa. Betapa tidak, masalah yang berujung pada konflik tersebut melibatkan dua lembaga penegak hukum yang memiliki kekuatan besar di Indonesia. KPK dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meskipun lembaga ini bersifat independen, KPK ternyata memiliki beberapa kewenangan yang sama dengan Polri. KPK berhak melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Hal inilah yang akhirnya dapat memicu konflik antara dua lembaga penegak hukum tersebut.

Berbagai media massa baik cetak maupun elektronik terus menyoroti konflik ini selama beberapa hari. Bahkan, tidak sedikit media yang menjadikan konflik ini sebagai sajian utama. Namun, dari sekian banyak media massa yang menjadikan konflik KPK-Polri tersebut sebagai laporan utama, hanya ada dua majalah berita mingguan yang dalam rentang waktu bersamaan menjadikan konflik ini sebagai laporan utama mereka, yaitu Majalah Berita Mingguan (MBM) *Tempo* dan *Gatra*.

Dalam Majalah Berita Mingguan Tempo edisi 2 – 8 Februari 2015 yang berjudul “Skenario Membidik KPK”, setidaknya terdapat tiga feature di rubrik laporan utama yang membahas konflik KPK dan Polri. Sedangkan, dalam Majalah Berita Mingguan Gatra edisi 5 – 11 Februari 2015 yang berjudul “Memperkuat Ekonomi Rakyat” juga terdapat tiga feature yang membahas tentang konflik KPK dan Polri dalam laporannya. Pada masing-masing edisi di kedua majalah diatas menunjukkan bahwa konflik KPK dan Polri menjadi perhatian khusus sebagai topik yang diangkat dalam laporan utama.

Tempo dan Gatra sampai saat ini masih menjadi majalah berita mingguan yang secara konsisten, setidaknya satu bulan sekali, menaruh perhatian besar pada isu-isu hukum dan politik dengan menjadikannya laporan utama. Apalagi jika melihat perjalanan kedua majalah ini yang tergolong panjang dan menjadi pionir bagi berbagai majalah mingguan di Indonesia.

Oleh karena itu, sangat menarik melihat bagaimana kedua majalah ini mengangkat isu terkait serangkaian peristiwa yang terjadi antara KPK dan Polri. Apalagi peristiwa tersebut berkaitan dengan kasus politik dan korupsi yang juga pernah menjadi sajian utama di Tempo dan Gatra. Selain sama-sama mengangkat isu yang sama sebagai laporan utama di tanggal yang berdekatan, memang tidak ada majalah lain yang secara khusus mengangkat isu mengenai konflik KPK-Polri ini sebagai laporannya.

Dengan banyaknya pendapat serta sudut pandang dari berbagai pihak yang menanggapi konflik KPK-Polri ini, menarik pula untuk melihat bagaimana kedua media ini menonjolkan aspek-aspek tertentu dan mengesampingkan aspek lain

dalam berita mengenai konflik ini. Inilah yang akhirnya disebut pembingkai media massa.

Eriyanto dalam bukunya *Analisis Framing, Konstruksi Ideologi dan Politik Media* mendefinisikan framing sebagai pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menseleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan dan hendak dibawa kemana berita tersebut (Eriyanto, 2002:68).

Analisis Pembingkai mengkritisi bagaimana Tempo dan Gatra membingkai pemberitaan tersebut, dan bagaimana realitas dan peristiwa konflik KPK-Polri tersebut di konstruksi oleh mereka. Sikap mendukung, positif atau negatif hanyalah efek dari bingkai yang dikembangkan oleh media. Tempo dan Gatra mengembangkan bingkai dan konstruksi yang berbeda mengenai pemberitaan konflik antara KPK dan Polri. Bingkai itulah yang digunakan oleh kedua media tersebut dalam menilai seluruh peristiwa konflik KPK-Polri.

Setiap media massa memiliki pemahaman serta pengalaman yang berbeda-beda terhadap suatu realitas. Apalagi dalam berita yang melaporkan konflik, ada beberapa aspek yang ditekankan media massa, yaitu bagaimana konflik tersebut bermula hingga cara penyelesaiannya. Hal itulah yang akhirnya berita di satu media dan media lainnya bisa sangat berbeda meskipun peristiwanya sama. Inilah yang penulis ingin teliti dalam laporan utama kedua media tersebut melalui salah satu model dalam analisis pembingkai yang memiliki kekhasan tersendiri

sebagai model yang biasanya dipakai untuk menganalisis berita konflik, yaitu model Robert M. Entman.

Ia mengungkapkan, konsep pembingkaiian digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Pembingkaiian dapat dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada isu lain (Eriyanto, 2002:186).

Entman melihat pembingkaiian dalam dua dimensi besar, yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas. Penonjolan dari sebuah aspek akan membuat informasi lebih bermakna, menarik, berarti, atau diingat oleh khalayak. Penentuan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, dan hendak dibawa kemana berita tersebut akan ditentukan cara pandang yang digunakan wartawan dan media massa dalam menangkap realitas hingga proses penulisan berita.

Selain menjabarkan pembingkaiian dalam dua dimensi besar. Entman juga mengemukakan tahap-tahap pembingkaiian atau pemahaman media terhadap suatu isu. Ia membagi tahap-tahap pembingkaiian ke dalam empat bagian, yaitu *define problems* (pendefinisian masalah), *diagnose causes* (memperkirakan masalah atau sumber masalah), *make moral judgement* (membuat keputusan moral), *treatment recommendation* (menekankan penyelesaian). Dengan perangkat-perangkat pembingkaiian yang dikemukakan Entman tersebut, penulis berharap dapat memahami pembingkaiian konflik KPK-Polri di Tempo dan Gatra.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah pbingkaian berita mengenai konflik KPK-Polri dalam majalah Tempo edisi 2-8 Februari 2015 dan majalah Gatra edisi 5-11 Februari 2015?

## 1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan identifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Tempo dan Gatra mendefinisikan masalah (*define problem*) mengenai konflik KPK-Polri?
2. Bagaimana Tempo dan Gatra memperkirakan sumber masalah (*diagnose causes*) mengenai konflik KPK-Polri?
3. Bagaimana Tempo dan Gatra menentukan keputusan moral (*make moral judgement*) mengenai konflik KPK-Polri?
4. Bagaimana Tempo dan Gatra menekankan penyelesaian masalah (*treatment recomendation*) mengenai konflik KPK-Polri?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan penelitian bagi peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui cara Tempo dan Gatra mendefinisikan masalah (*define problem*) mengenai konflik KPK-Polri.
2. Untuk mengetahui cara Tempo dan Gatra memperkirakan sumber masalah (*diagnose causes*) mengenai konflik KPK-Polri.

3. Untuk mengetahui cara Tempo dan Gatra menentukan keputusan moral (*make moral judgement*) mengenai konflik KPK-Polri.
4. Untuk mengetahui cara Tempo dan Gatra menekankan penyelesaian masalah (*treatment recommendation*) mengenai konflik KPK-Polri.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah dalam bidang jurnalistik yang berkaitan dengan media massa terutama majalah berita mingguan. Penelitian ini juga diharapkan mampu memperkaya kajian mengenai analisis pbingkaiian model Robert M. Entman di media massa.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

Secara praktis, melalui penelitian ini, penulis diharapkan mampu mengetahui penyeleksian isu di antara media massa terutama majalah berita mingguan terhadap suatu peristiwa yang menimbulkan konflik, sekaligus dapat mengetahui penonjolan fakta-fakta yang dilakukan Tempo dan Gatra terhadap konflik KPK-Polri. Dengan demikian, hasil penelitian ini bisa menjadi masukan bagi media massa dalam memberikan peristiwa-peristiwa serupa. Penelitian ini juga mampu menjadi alat pembelajaran bagi masyarakat untuk memahami proses penyeleksian isu dalam media massa.

## 1.6 Tinjauan Penelitian Sejenis

Penelitian terdahulu bisa digunakan sebagai bahan rujukan dan pembenaran atas penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian terdahulu bisa membantu penulis dalam menentukan perspektif, metode, dan subjek. Beberapa penelitian sebelumnya membahas mengenai subjek yang sama, metode penelitian yang sama, dan bahkan keduanya. Berikut ini adalah beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini:

Skripsi Yahya Yoshua Leander, mahasiswa Jurusan Jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (Fikom Unpad), dengan judul, “Pemberitaan Perseteruan Susno Duadji dengan Institusi Polri di Majalah Berita Mingguan Tempo”, pada tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemingkakan pemberitaan perseteruan Susno Duadji dengan Polri di Tempo dilihat dari segi pendefinisian masalah, perkiraan penyebab masalah, keputusan moral yang dibuat, dan rekomendasi penyelesaian masalah. Hasil penelitian menunjukkan, Tempo melihat perseteruan antara Susno Duadji dengan Polri sebagai masalah hukum dan politik. Simpulan berita ini adalah, Tempo melihat bahwa salah satu penyebab perseteruan Susno Duadji dengan Polri adalah persaingan untuk memperebutkan kursi Kapolri yang akan kosong pada Oktober 2010.

Skripsi Winda Handayani, mahasiswa Jurusan Jurnalistik Fikom Unpad, dengan Judul, “Pemberitaan Peringatan 5.0 Tahun Konferensi Asia Afrika pada Majalah Gatra edisi Khusus”, pada tahun 2005. Penelitian ini menggunakan metode analisis pemingkakan model Robert M. Entman. Penelitian ini

menyimpulkan bahwa Gatra mendefinisikan peringatan 50 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) hanya sebagai acara seremonial biasa saja. Gatra justru lebih memfokuskan berita-berita di edisi ini pada paham neoliberalisme yang banyak dianut banyak negara anggota KAA, yang tidak cocok dengan roh KAA dan semangat Dasasila Bandung.

Skripsi Remmy Faizal Basalama, mahasiswa Jurusan Jurnalistik Fikom Unpad, dengan judul, "Orientasi pemberitaan Bom London 7/7 di MBM Tempo dan Gatra di Jakarta", pada tahun 2006. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bingkai pemberitaan Tempo dan Gatra atas terhadap peristiwa bom London 7/7. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis pembingkai model Robert M. Entman. Model ini digunakan untuk mengetahui cara media massa mengkonstruksi realitas dengan mengidentifikasi pendefinisian masalah, perkiraan sumber masalah, penilaian moral, dan penekanan penyelesaian masalah pada berita yang diteliti. Hasil penelitian dan simpulannya, Tempo dan Gatra melihat bom London 7/7 sebagai masalah politik yang tidak terlepas dari kondisi faktual politik internasional semenjak peristiwa World Trade Center (WTC) pada September 2001 yang lebih banyak berkisah soal perseteruan dunia Barat versus Islam.

Ketiga penelitian terdahulu di atas mengambil subjek penelitian yang sama dengan penelitian penulis, yaitu Tempo dan Gatra, Ketiga penelitian tersebut memakai metode yang sama pula, yaitu analisis pembingkai model Robert M Entman. Penulis akan memakai metode yang sama dengan ketiga penelitian terdahulu tersebut karena dari karakteristik teks yang akan diteliti oleh penulis,

ada kesamaan dengan ketiga penelitian terdahulu di atas, yakni mengandung unsur konflik yang cukup kuat. Selain itu, penulis juga memiliki tujuan yang sama dalam analisis teks ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana Tempo dan Gatra mendefinisikan masalah Konflik KPK-Polri yang nantinya akan berimplikasi kepada bagaimana kedua media tersebut melihat penyebab masalahnya, memberikan penilaian moral, serta menekankan penyelesaian atas konflik tersebut. Selain itu, dari ketiga penelitian terdahulu tersebut, ada beberapa perbedaan dan kritik dari penulis. Hal tersebut bisa dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>Peneliti (tahun)</b>	<b>Yahya Yosua Leander (2010)</b>	<b>Winda Handayani (2005)</b>	<b>Remmy Faizal Basalama (2006)</b>
<b>Masalah</b>	Pemberitaan Perseteruan Susno Duadji dengan Institusi Polri di Majalah Berita Mingguan Tempo	Pemberitaan Peringatan 50 Tahun Konferensi Asia Afrika pada Majalah Gatra Edisi Khusus	Orientasi Pemberitaan Bom London 7/7 di MBM Tempo dan Gatra di Jakarta
<b>Metode</b>	Metode penelitian kualitatif dengan analisis pembedaan model Robert M. Entman	Metode penelitian kualitatif dengan analisis pembedaan model Robert M. Entman	Metode penelitian kualitatif dengan analisis pembedaan model Robert M. Entman
<b>Hasil</b>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tempo memandang masalah ini sebagai masalah hukum dan politik. Simpulannya adalah, Tempo melihat salah satu penyebab perseteruan Susno Duadji dengan Polri	Penelitian ini menyimpulkan bahwa Gatra mendefinisikan peringatan 50 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) hanya sebagai acara seremonial biasa saja. Gatra justru lebih memfokuskan berita-berita di edisi ini pada	Hasil penelitian dan simpulannya, Tempo dan Gatra melihat bom London 7/7 sebagai masalah politik yang tidak terlepas dari kondisi faktual politik internasional semenjak peristiwa <i>World Trade Centre</i> (WTC) pada

	adalah persaingan untuk memperebutkan kursi Kapolri yang akan kosong pada Oktober 2010.	paham neoliberalisme yang banyak dianut banyak negara anggota KAA, yang tidak cocok dengan roh KAA dan semangat Dasasila Bandung.	September 2001 yang lebih banyak berkisah soal persetujuan dunia Barat versus Islam.
<b>Kritik</b>	Penelitian kurang komprehensif karena hanya membahas salah satu faktor penyebab perseteruannya saja.	Tidak jelas mengapa Gatra bisa berpandangan bahwa peristiwa tersebut memiliki keterkaitan dengan paham neoliberalisme.	
<b>Perbedaan</b>	Penelitian Yahya Yosua Leander hanya membahas satu faktor penyebab konflik sedangkan dalam penelitian ini, penulis akan membahas seluruh faktor penyebab konflik	Penelitian Winda Handayani tidak menjelaskan alasan Gatra memandang suatu kasus dalam bingkai tertentu. Dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai latar belakang mengapa akhirnya Tempo dan Gatra memandang suatu kasus dalam sebuah bingkai tertentu.	Objek penelitian Remmy Faizal Basalama adalah teks yang berisi persetujuan antar paham dan ideologi tertentu. Dalam penelitian ini objek penelitian adalah teks yang berisi persetujuan antar institusi.

Sumber: Hasil penelitian 2015

### 1.7 Kerangka Pemikiran

Media massa memegang peranan penting dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Onong Uchjana Effendy mendefinisikan media massa sebagai berikut:

“Media massa adalah medium komunikasi yang digunakan untuk mengirim informasi dan menyampaikan pesan dengan bantuan teknologi kepada sejumlah orang banyak. Media massa memiliki ciri khas yakni berkemampuan memikat perhatian khalayak secara

serempak (*simultaneous*) dan serentak (*instaneous*) yakni pers, film, radio, dan televis.” (Effendy, 2003:313)

Sebagai bagian dari media massa, pers tentunya memiliki andil dalam proses penyampaian informasi tersebut. hal itu dikemukakan secara jelas dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang pokok Pers Nomor 40 tahun 1999 yang mendefinikan pers sebagai berikut:

“Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.” (Sumadiria, 2005:31)

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalismenya. Oleh karena itu, dibentuklah Kode Etik Jurnalistik sebagai pedoman tersebut.

Dalam sudut pandang konstruktisionis, media massa terus menerus melaksanakan proses penyampaian pesan berupa berita sebagai sebuah realitas yang dikonstruksikan kembali. Dalam hal ini, media massa akan mengkontruksi berbagai peristiwa yang acak dan kompleks untuk disusun kembali ke dalam sebuah berita.

Proses konstruksi berita itu sendiri dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang termasuk dalam faktor internal antara lain ideologi, teknik, kepercayaan, kepentingan pada tingkat perorangan atau kelompok, juga struktur organisasi media tersebut. sedangkan yang termasuk

dalam faktor eksternal antara lain sistem politik, ekonomi, maupun sosiokultural. Dengan adanya faktor-faktor tersebut, yang mempengaruhi proses konstruksi berita, tidak mengherankan bila akhirnya sebuah peristiwa diberitakan dengan cara maupun sudut pandang yang berbeda oleh media massa yang berbeda pula.

Namun sebelum sampai pada tingkat media massa, proses mengkonstruksi kembali tersebut sebelumnya akan dilakukan oleh wartawan. Wartawan bisa menyajikan realitas secara benar, kalau ia bertindak profesional dengan menyingkirkan keberpihakan dan pilihan moral sehingga mengungkapkan fakta dengan apa adanya. Namun, menurut kaum konstruksionis, wartawan tidak bisa menyembunyikan pilihan moral dan keberpihakannya, karena merupakan bagian yang intrinsik dalam pembentukan berita. Realitas tercipta dari proses konstruksi melalui sudut pandang tertentu dari wartawan. Konstruksi wartawan ini sendiri dipengaruhi oleh makna, interpretasi, dan hasil realisasi antara individu dan objek (Eriyanto, 2002:28).

Analisis pembedahan (*framing*) dapat digunakan untuk melihat siapa dalam struktur kekuasaan, pihak mana yang dirugikan, siapa penindas dan pihak mana yang tertindas, kebijakan politik mana yang harus di dukung dan yang tidak boleh di dukung. Bagaimana Majalah Berita Mingguan Tempo dan Gatra membingkai pemberitaan konflik antara KPK dan Polri, pada siapa surat kabar tersebut berpihak.

Tabel 1.2

## Tahap Komunikasi

Tahap	Frame
Pertama Komunikator	Bagaimana seorang mengkonstruksi peristiwa, membingkai pesan tertentu, secara sadar atau tidak sadar komunikator memproduksi <i>frame</i> ketika berkomunikasi.
Kedua Teks atau isi	Isi teks komunikasi baik eksplisit maupun implisit mempunyai perangkat <i>frame</i> tertentu dalam pesan, baik pada level tematik, maupun perangkat pendukungnya (kata, kalimat, dsb)
Ketiga Penerimaan ( <i>receiver</i> )	Penerimaan pihak yang pasif menerima begitu saja pesan yang datang kepadanya, sebaliknya ia menggunakan kerangka penafsirannya untuk menafsirkan pesan yang datang sehingga bisa jadi bingkai yang diberikan oleh penerima berbeda dengan bingkai yang diberikan oleh komunikator.
Keempat Masyarakat	Masyarakat juga menyediakan <i>frame</i> tertentu berupa perspektif bagaimana peristiwa bisa dipahami, nilai-nilai yang ada dalam masyarakat adalah bahan yang siap sedia dipakai oleh anggota komunitasnya untuk menafsirkan pesan.

Sumber: Eriyanto, 2002:292

Wartawan serta media massa terus menerus melakukan proses konstruksi terhadap realitas, maka produk yang dihasilkan, yaitu berita, hanyalah sebuah konstruksi dari realitas. James W. Carey dalam (Eriyanto, 2002:25) menjelaskan, berita bukanlah sebuah informasi melainkan drama. Berita bukan menggambarkan

realitas, tetapi potret dari arena pertarungan antara berbagai pihak yang berkaitan dengan peristiwa.

Dalam sebuah berita, yang disampaikan secara berbeda antara satu media massa dengan media massa lainnya, terdapat penonjolan sisi tertentu dalam sebuah peristiwa sambil mengesampingkan sisi lainnya. Dengan demikian, media massa telah melakukan sebuah pembingkaihan terhadap suatu peristiwa sehingga menghasilkan berita atau potret yang memiliki makna tertentu.

Oleh karena itu, berita dalam pandangan konstruksi sosial bukan merupakan peristiwa atau fakta dalam arti yang riil melainkan produk interaksi antara wartawan dengan fakta. Dalam pekerjaannya, wartawan mau tidak mau akan bersinggungan langsung dengan realitas. Realitas tersebut kemudian akan diserap dalam kesadaran wartawan untuk kemudian dimaknai (Eriyanto, 2002:17).

Proses mengkonstruksi realitas dan menyajikannya kembali melalui media massa oleh wartawan disebut pembingkaihan (*framing*). Oleh karena itu, analisis pembingkaihan merupakan cara untuk membedah sejauh mana sebuah realitas dikonstruksikan dan disajikan kembali.

Menurut Robert M. Entman, analisis pembingkaihan termasuk ke dalam paradigma konstruksionis. Entman melihat pembingkaihan dalam dua dimensi besar, yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas. Penonjolan dari sebuah aspek akan membuat informasi lebih bermakna, menarik, berarti, atau diingat oleh khalayak. Penentuan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, dan hendak dibawa ke mana

berita tersebut akan ditentukan cara pandang yang digunakan wartawan dan media massa dalam menangkap realitas hingga proses penulisan berita.

Selain menjabarkan pembingkaiian dalam dua dimensi besar, Entman juga mengemukakan tahap-tahap pembingkaiian atau pemahaman media terhadap suatu isu. Ia membagi tahap-tahap pembingkaiian ke dalam empat bagian, yaitu *define problems* (pendefinisian masalah), *diagnose causes* (memperkirakan masalah atau sumber masalah), *make moral judgement* (membuat keputusan moral), *treatment recommendation* (menekankan penyelesaian).

Terkait dengan konflik KPK-Polri ini, Tempo dan Gatra sudah tentu akan melakukan proses konstruksi realitas tersebut. Sebagai sebuah media massa yang merekam sebuah peristiwa, Tempo dan Gatra akan melakukan pembingkaiian terhadap konflik KPK-Polri dengan menonjolkan aspek tertentu dan mengesampingkan aspek lainnya. Melalui analisis pembingkaiian yang dikemukakan Entman tersebut, penulis akan meneliti bagaimana Tempo dan Gatra mengkonstruksi konflik KPK-Polri tersebut sehingga menghasilkan bingkai tertentu yang disajikan kepada masyarakat.

Meskipun berita-berita yang disajikan di media massa merupakan hasil dari sebuah konstruksi yang menghasilkan suatu pembingkaiian serta memiliki kecenderungan untuk mengesampingkan aspek yang satu dengan yang lainnya, media massa juga tidak bisa terlepas begitu saja dari prinsip-prinsip jurnalisme yang ada.

Bill Kovach dan Tom Rosentiel dalam buku mereka yang berjudul *Elemen-elemen Jurnalisme* mengungkapkan adanya prinsip-prinsip tertentu yang

seharusnya diketahui wartawan sekaligus diharapkan publik. Awalnya mereka mengungkapkan ada sembilan prinsip, namun dalam perkembangannya, mereka menambahkan satu elemen lagi sehingga menjadi sepuluh elemen. Dalam penelitian ini, penulis akan fokus pada elemen ketiga, keempat, dan kedelapan, yaitu mengenai disiplin verifikasi, independensi, serta berita yang komprehensif dan proposional.

Dalam disiplin verifikasi, jurnalis tidak bisa disamakan dengan hiburan, propaganda, fiksi, atau seni. Hal tersebut bisa dilihat dari proses peliputan seperti mencari saksi-saksi atau sumber berita. Disiplin verifikasi berfokus untuk menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Ada sejumlah prinsip intelektual dalam ilmu peliputan, yaitu jangan menambah-nambahkan sesuatu yang tidak ada, jangan mengecoh audiens, bersikaplah transparan sedapat mungkin tentang motif dan metode yang digunakan, lebih mengandalkan pada liputan orisinal yang dilakukan sendiri, serta bersikap rendah hati dan tidak menganggap diri paling tahu.

Jurnalis juga harus tetap independen dari pihak yang mereka liput. Wartawan harus bisa menjaga semangat independensi dan pikiran ketika bekerja di ranah opini, kritik, dan komentar. Oleh karena itu, independensi lebih penting dari netralitas. Sangat penting bagi wartawan untuk menjaga jarak dengan sumber supaya bisa membuat penilaian dengan jelas dan independen.

Selain itu, Jurnalis harus menjaga agar beritanya komprehensif dan proposional. Jurnalis harus mampu menyediakan informasi yang komprehensif

dan proposional agar publik mampu memahami dengan lebih baik setiap informasi yang disampaikan.

Sebagai lembaga yang menyebarkan berita yang terkait sebuah konflik, menurut Iswadi Syahputra dalam *Jurnalisme Damai*, Tempo dan Gatra juga harus memperhatikan bagaimana berita yang mereka tulis bisa menjadi sebuah pendamai atau setidaknya tidak memperpanjang konflik atau justru membuat konflik-konflik baru.

Melalui beberapa hal tersebut, penulis akan meneliti sejauh mana Tempo dan Gatra memerhatikan berbagai standar dan aturan dalam dunia jurnalisme dalam memberitakan konflik KPK-Polri ini. Penulis akan meneliti apakah konstruksi yang dilakukan Tempo dan Gatra dalam usahanya untuk meringkai konflik KPK-Polri ini melanggar aturan-aturan tersebut atau tidak.

## **1.8 Langkah-langkah penelitian**

### **1.8.1 Metodologi Penelitian**

Metodologi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut John W. Creswell adalah sebagai berikut:

*“Qualitative research is an inquiry process of understanding based on distinct methodological traditions of inquiry that explore a social or human problem. The reaseacher builds a complex, holistic picture, analyzes words, reports detailed views of informant, adn conducts the study in a natural setting.”* (Penelitian kualitatif adalah proses penyelidikan akan pemahaman berdasarkan tradisi metodologi yang mengeksplorasi masalah sosial atau manusia. Peneliti membangun kompleksitas, gambaran holistik, menganalisis kata-kata, melaporkan pandangan informan secara rinci, dan melakukan penelitian dalam tata cara yang alami (Creswell, 1998:15)

Teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis pembedingkaian (*framing analysis*). Pada dasarnya analisis pembedingkaian dipakai peneliti untuk melihat bagaimana sebuah peristiwa diceritakan kembali oleh media. Cara bercerita itu tergambar pada “cara melihat” terhadap realitas yang dijadikan berita. Dengan begitu, hasil akhir dari konstruksi realitas yang diceritakan kembali sangat dipengaruhi bagaimana media tersebut melihat peristiwa yang terjadi (Eriyanto, 2002: 10).

Model analisis pembedingkaian yang akan dipakai adalah model Robert M. Entman. Ia mengungkapkan, konsep pembedingkaian digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Pembedingkaian dapat dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada isu lain (Eriyanto, 2002:186).

Entman melihat pembedingkaian dalam dua dimensi besar, yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas. Penonjolan dari sebuah aspek akan membuat informasi lebih bermakna, menarik, berarti, atau diingat oleh khalayak. Penentuan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, dan hendak dibawa ke mana berita tersebut akan ditentukan cara pandang yang digunakan wartawan dan media massa dalam menangkap realitas hingga proses penulisan berita. Sedangkan yang kedua, aspek penonjolan realitas, aspek ini berhubungan dengan penulisan fakta. Fakta tertentu dari suatu peristiwa atau isu tersebut telah terpilih, bagaimana aspek tersebut

ditulis oleh wartawan. Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar, dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak.

Dengan begitu, setiap media tentunya akan memiliki kerangka keberpihakannya sendiri yang terlihat dari bagaimana media tersebut menyeleksi isu serta menonjolkan aspek tertentu dari isu tersebut. Selain menjabarkan pembedaan dalam dua dimensi besar, Entman juga mengemukakan tahap-tahap pembedaan atau pemahaman media terhadap suatu isu.

## **1.8.2 Jenis dan sumber data**

### **1.8.2.1 Jenis data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif.

Data yang diidentifikasi dalam penelitian ini diantaranya:

1. Data mengenai pendefinisian masalah (*define problem*) dari Majalah Tempo dan Gatra dalam pemberitaan KPK-Polri.
2. Data mengenai perkiraan masalah (*diagnose causes*) dari Majalah Tempo dan Gatra dalam pemberitaan KPK-Polri.
3. Data mengenai keputusan moral (*make moral judgement*) dari Majalah Tempo dan Gatra dalam pemberitaan KPK-Polri.
4. Data mengenai penyelesaian masalah (*treatment recommendation*) dari Majalah Tempo dan Gatra dalam pemberitaan KPK-Polri.

### **1.8.2.2 Sumber data primer**

Data primer dalam penelitian ini adalah pemberitaan konflik KPK-Polri pada Majalah Berita Mingguan Tempo edisi 2 - 8 Februari 2015 dan Majalah Berita Mingguan *Gatra* edisi 5 -11 Februari 2015.

### **1.8.2.3 Sumber data sekunder**

Sumber data sekunder diperoleh dari wawancara kepada reporter dan redaktur Majalah Berita Mingguan Tempo dan *Gatra*, yang mengolah pemberitaan mengenai konflik KPK dan Polri.

### **1.8.3 Teknik pengumpulan data**

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara-cara berikut:

1. Studi Dokumentasi Mengenai KPK dan Polri

Peneliti mengumpulkan tulisan-tulisan di majalah Tempo dan *Gatra* yang sesuai dengan topik yang diteliti.

2. Wawancara

Peneliti juga akan melakukan wawancara untuk memperoleh informasi yang tidak dapat diperoleh melalui referensi tertulis.

### **1.8.4 Analisis data**

Untuk mengolah data dalam penelitian ini, langkah-langkah yang dilakukan peneliti adalah dengan mengumpulkan pemberitaan konflik KPK-Polri pada Majalah Berita Mingguan Tempo edisi 2 - 8 Februari 2015 dan Majalah Berita Mingguan *Gatra* edisi 5 -11 Februari.

Setelah objek pemberitaan terkumpul, langkah selanjutnya menganalisis data dengan menggunakan analisis framing model Robert M. Entman. Kerangka operasionalnya tersebut antara lain:

1. *Define problems* (pendefinisian masalah), yaitu pemberitaan tersebut hendak dinilai sebagai penonjolan kekuasaan kepemimpinan serta pengaruhnya terhadap gaya pemberitaan.
2. *Diagnose causes* (memperkirakan masalah atau sumber masalah), yaitu penilaian terhadap penyebab lahirnya gaya pemberitaan politik yang berbeda.
3. *Make moral judgement* (membuat keputusan moral), yaitu penilaian terhadap penyebab masalah.
4. *Treatment recommendation* (menekankan penyelesaian), yaitu menawarkan suatu cara untuk menyelesaikan masalah.

Setelah data dari Tempo dan Gatra tersebut dianalisis, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan mengenai perbedaan bingkai berita dari kedua majalah mingguan tersebut.